



KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

2023

# LAPORAN KINERJA UKPBJ

KEMENTERIAN  
LUAR NEGERI

BIRO UMUM



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN KINERJA UKPBJ KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2023**

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**  
**BIRO UMUM**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

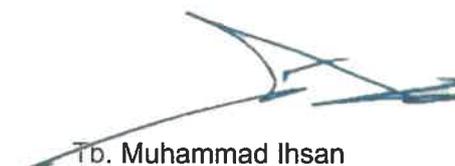
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Bagian Layanan Pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum selama tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Biro Umum terhadap amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja juga berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja UKPBJ Tahun 2023 memberikan gambaran hasil pengukuran pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Biro Umum Tahun 2023 dan merujuk Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Luar Negeri.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan pula perencanaan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum, di masa mendatang lebih meningkat melalui evaluasi atas kendala dan hambatan yang dihadapi.

Jakarta, Januari 2024  
Kepala Bagian Layanan Pengadaan/  
Kepala UKPBJ



Tb. Muhammad Ihsan  
NIP. 19810202 200603 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>BAGIAN I PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
<b>BAGIAN II RANGKUMAN EKSEKUTIF</b>	<b>8</b>
<b>BAGIAN III DASHBOARD REALISASI PENGADAAN</b>	<b>10</b>
<b>BAGIAN IV PENCAPAIAN TARGET KINERJA</b>	<b>13</b>
<b>BAGIAN V ANALISA DAN REKOMENDASI</b>	<b>14</b>
5.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	14
5.2 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	15
5.3 Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	16
5.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	17
<b>PENUTUP</b>	<b>18</b>

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2023 yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Penyusunan LKj Tahun 2023 telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, LKj Bagian Layanan Pengadaan dalam memaparkan analisis capaian kinerja, beserta dengan kendala dan solusi yang dihadapi selama tahun 2023 telah mengacu pada 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process*, dan *Learning and Growth*.

Bagian Layanan Pengadaan memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa Kesekjenan dan seluruh Satker Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ terus berupaya meningkatkan manajemen kinerja dengan berpedoman pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah yang berlaku.

### B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Hasil Pencapaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai jalur komunikasi atau pelaporan pencapaian kinerja yang dapat digunakan selama satu tahun baik dalam bentuk cetak, sistem informasi online, maupun dalam bentuk presentasi kepada pemangku kepentingan

### **D. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**

Bagian Layanan Pengadaan merupakan salah satu Bagian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Permenlu No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri pada pasal 133, Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Permenlu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri pada pasal 134 bahwa untuk menjalankan amanat ketentuan perundang-undangan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik dibawah naungan Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ Kementerian Luar Negeri.

Lebih lanjut dalam Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga, besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria yang merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ yang dihitung berdasarkan rata-rata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Hasil penghitungan ukuran organisasi UKPBJ yang telah dilakukan oleh Biro Umum Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2023, ukuran UKPBJ Kementerian Luar Negeri memiliki nilai 62,19 atau dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator (Kepala Bagian).

### E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Layanan Pengadaan Biro Umum terdiri atas, yaitu:



## BAGIAN II

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pada Tahun 2023, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja yang dijabarkan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut usulan proses pemilihan penyedia dari Satker
2. Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
3. Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa
4. Tingkat kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

UKPBJ Kementerian Luar Negeri di Tahun Anggaran 2023 telah menyelesaikan Pengadaan melalui tender/seleksi sebanyak 60 Paket dengan HPS sebesar Rp150.042.554.552,80 dan nilai kontrak Rp134.869.865.280,07. Efisiensi yang berhasil dicapai atas pengadaan tender/seleksi tersebut sebesar Rp15.172.689.272,73 atau 11,24% dari nilai HPS.

Terdapat 181 transaksi *e-purchasing* yang dilaksanakan oleh PP/PPK dengan nilai transaksi *e-purchasing* sebesar Rp248.886.854.764 dari rencana sebesar Rp368.201.582.251.

Berikut adalah **transaksi** Kementerian Luar Negeri melalui *e-purchasing* :

- a. Rp 182.874.052.952 atau 73,5% melalui katalog nasional;
- b. Rp 53.526.994.818 atau 21,5% melalui katalog sektoral; dan
- c. Rp12.485.806.994 atau 5,0% melalui katalog lokal.

Terkait dengan katalog sektoral Kementerian Luar Negeri, UKPBJ Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan 13 etalase dengan rincian sebagai berikut:

- a. Etalase Alat Pelindung Diri Kementerian Luar Negeri
- b. Etalase Alat Tulis Kantor Kementerian Luar Negeri
- c. Etalase Galeri Nusantara Kementerian Luar Negeri
- d. Etalase Jasa Keamanan Kementerian Luar Negeri
- e. Etalase Jasa Kebersihan Kementerian Luar Negeri
- f. Etalase Jasa Pengiriman Internasional Kementerian Luar Negeri
- g. Etalase Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Luar Negeri
- h. Etalase Makanan dan Minuman Kementerian Luar Negeri
- i. Etalase Pakaian Dinas Kementerian Luar Negeri
- j. Etalase Peralatan Rumah Tangga dan Perkantoran Kementerian Luar Negeri
- k. Etalase Perangkat Pengolah Data dan TIK Kementerian Luar Negeri
- l. Etalase Servis Kendaraan Kementerian Luar Negeri
- m. Etalase Sewa Furnitur Kementerian Luar Negeri

Sepanjang Tahun 2023, terdapat 28.926 pelaku usaha yang telah terlibat dalam pengisian produk **katalog sektoral** Kementerian Luar Negeri. Adapun klasifikasi pelaku usaha yang melakukan listing pada katalog sektoral Kemenlu sbb:

UMKM Kecil	:	13.571 atau 46,9%
Non-UMKM	:	6.274 atau 21,7%
UMKM Mikro	:	6.046 atau 20,9%
UMKM Menengah	:	3.035 atau 10,49%

*\*Data Redash LKPP Tahun 2023*

para pelaku usaha tersebut telah melakukan listing 802.177 produk yang terdiri dari:

Produk Lokal Tanpa TKDN	:	496.156 atau 61,85%
Produk Lokal TKDN	:	199.284 atau 24,84%
Impor	:	106.737 atau 13,31%

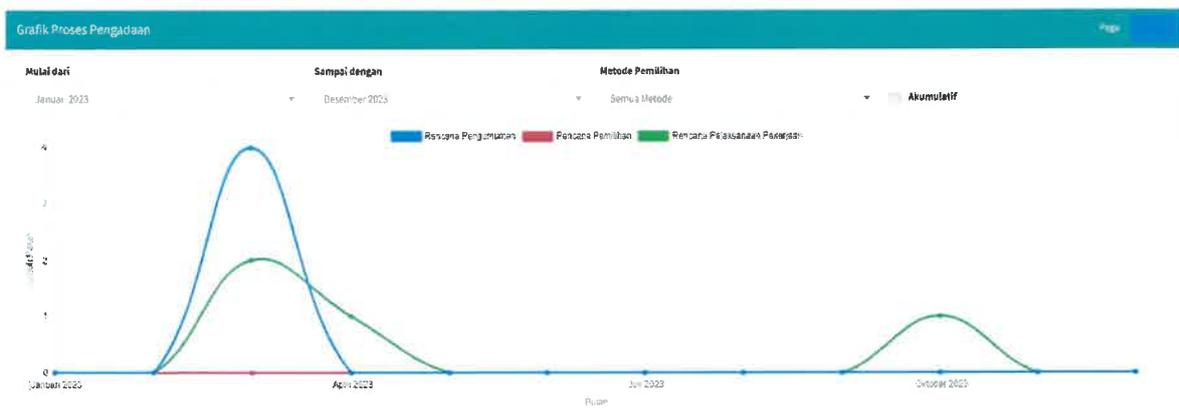
*\*Data Redash LKPP Tahun 2023*

## BAGIAN III

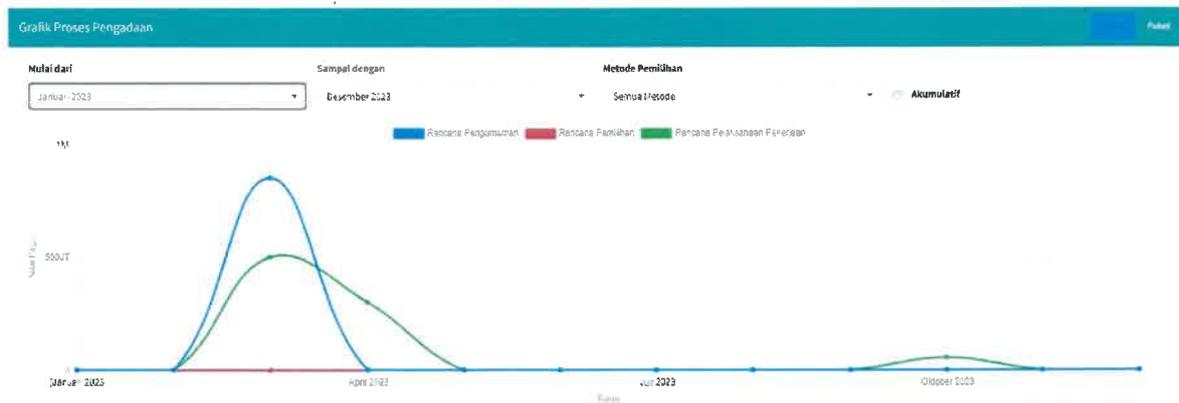
# DASHBOARD REALISASI PENGADAAN

Berikut adalah data Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ yaitu Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan yang dikecualikan dan melalui PP/PPK yaitu Pengadaan Langsung dan E-Purchasing telah diselesaikan berdasarkan usulan dari Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan **jumlah paket dan pagu anggaran**.

Tabel 3.1 Grafik Pengadaan berdasarkan Paket

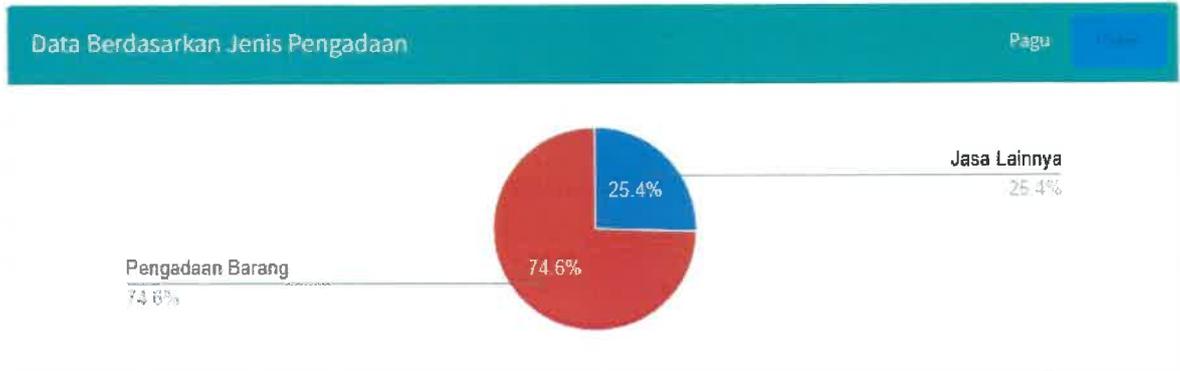


### 3.2 Grafik Pengadaan berdasarkan Pagu Anggaran



Berikut adalah data Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ yaitu Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan yang dikecualikan melalui PP/PPK yaitu Pengadaan Langsung dan E-Purchasing telah diselesaikan berdasarkan usulan dari Unit Kerja Eselon 2 di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan **jenis pengadaan, jenis belanja, dan metode pengadaan**.

### 3.3 Diagram berdasarkan Jenis Pengadaan



Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan data jenis pengadaan tahun 2023:

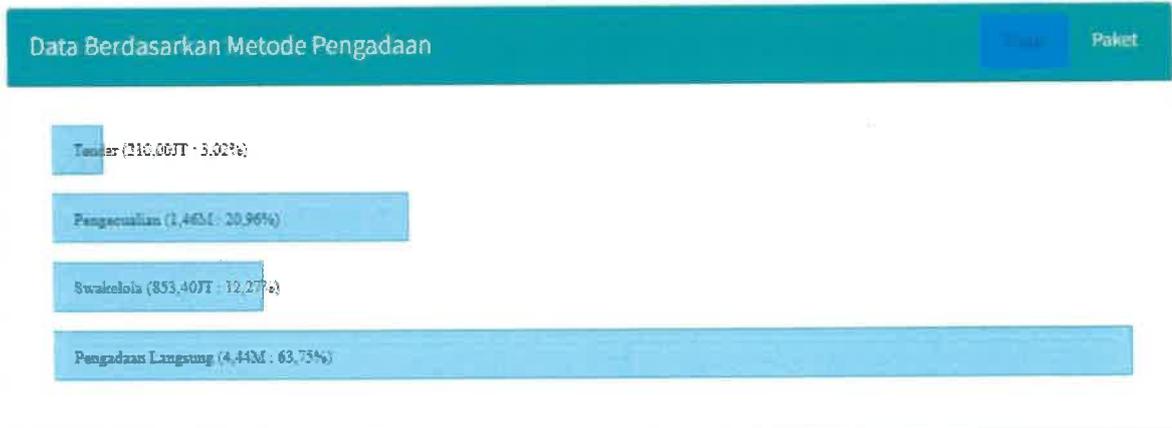
- pengadaan barang : 74,6%
- pengadaan jasa lainnya : 25,4%

### 3.4 Diagram berdasarkan Jenis Belanja



Pada Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja barang/jasa yang teridentifikasi sebesar 98,28% dan yang belum teridentifikasi sebesar 1,72%. Hal tersebut sebagai rekap kebutuhan belanja rutin yang dilaksanakan setiap satker di Kementerian Luar Negeri.

### 3.5 Diagram berdasarkan Metode Pengadaan



Pada tahun 2023 Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa berdasarkan metode pengadaan paling banyak dicapai tahun 2023 dengan menggunakan metode:

- Pengadaan Langsung 63,73%,
- Pengadaan dikecualikan 20,96%,
- Swakelola 12,27%, dan
- Tender 3,02%.

## BAGIAN IV PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja UKPBJ dibagi menjadi 4 (empat) area pengukuran yaitu aspek **waktu, biaya, kualitas, dan tingkat layanan**. Layanan pengadaan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan cukup baik dan optimal. Namun demikian, pengelolaan kinerja akan terus ditingkatkan dan dievaluasi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan efektifitas layanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun-tahun anggaran yang akan datang.

Area Pengukuran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Target 2023	Realisasi 2023	Pencapaian
Waktu	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	Jumlah Paket	100%	100%	Baik
		Pagu Anggaran	100%	100%	Baik
Biaya	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	9%	15,55%	Baik
Kualitas	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	-	100%	98,44%	Baik
Tingkat Layanan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	Internal dan Eksternal	93.87 %	93,87 %	Baik

## BAGIAN V ANALISA DAN REKOMENDASI

### 5.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa						
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan						
Hasil Penilaian	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jumlah Paket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Target</b></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>Realisasi</b></td> <td>98,44%</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Paket	<b>Target</b>	100%	<b>Realisasi</b>	98,44%
	Jumlah Paket						
<b>Target</b>	100%						
<b>Realisasi</b>	98,44%						
Justifikasi dan Rekomendasi	<p>Berdasarkan data monitoring UKPBJ Kementerian Luar Negeri terdapat 1185 sub paket Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode <i>e-purchasing</i> oleh PP/PPK. 60 Paket pengadaan metode tender yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan (berdasarkan surat permohonan permintaan pokja pemilihan) namun dalam realisasinya dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 paket diselesaikan,</li> <li>• 15 paket batal (pokja pemilihan merekomendasikan pelaksanaan pengadaannya melalui <i>e-purchasing</i>)</li> <li>• 1 paket gagal</li> </ul> <p>sehingga didapatkan persentase % Penyelesaian Pemilihan Penyedia PBJ (jumlah PBJ selesai/jumlah pbj diproses) sebesar 97,78%.</p> <p>Kinerja ketepatan waktu dari Satuan Kerja dapat dilakukan dengan sempurna dengan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan optimalisasi mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul, sehingga usulan paket Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat selesai tepat waktu (memenuhi target).</p>						

## 5.2 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa																																													
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa																																													
Hasil Penilaian		HPS																																												
	Target	9%																																												
	Realisasi	15,55%																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>HPS</th> <th>Nilai Kontrak</th> <th>Selisih/Efisiensi HPS</th> <th>% HPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Barang</td> <td>5</td> <td>Rp8.403.723.000,00</td> <td>Rp8.353.642.329,00</td> <td>Rp50.080.671,00</td> <td>0,60%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jasa Konsultasi</td> <td>8</td> <td>Rp4.300.863.313,00</td> <td>Rp3.909.876.210,00</td> <td>Rp390.987.103,00</td> <td>9,09%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jasa Lainnya</td> <td>40</td> <td>Rp85.289.967.140,80</td> <td>Rp73.982.770.024,80</td> <td>Rp11.130.197.116,00</td> <td>1,33%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>7</td> <td>Rp58.984.891.503,00</td> <td>Rp56.312.703.265,27</td> <td>Rp2.672.188.237,73</td> <td>4,53%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>60</b></td> <td><b>Rp156.979.444.956,80</b></td> <td><b>Rp142.558.991.829,07</b></td> <td><b>Rp14.420.453.127,73</b></td> <td><b>15,55%</b></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	HPS	Nilai Kontrak	Selisih/Efisiensi HPS	% HPS	1	Barang	5	Rp8.403.723.000,00	Rp8.353.642.329,00	Rp50.080.671,00	0,60%	2	Jasa Konsultasi	8	Rp4.300.863.313,00	Rp3.909.876.210,00	Rp390.987.103,00	9,09%	3	Jasa Lainnya	40	Rp85.289.967.140,80	Rp73.982.770.024,80	Rp11.130.197.116,00	1,33%	4	Pekerjaan Konstruksi	7	Rp58.984.891.503,00	Rp56.312.703.265,27	Rp2.672.188.237,73	4,53%	<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>Rp156.979.444.956,80</b>	<b>Rp142.558.991.829,07</b>	<b>Rp14.420.453.127,73</b>	<b>15,55%</b>			
No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	HPS	Nilai Kontrak	Selisih/Efisiensi HPS	% HPS																																								
1	Barang	5	Rp8.403.723.000,00	Rp8.353.642.329,00	Rp50.080.671,00	0,60%																																								
2	Jasa Konsultasi	8	Rp4.300.863.313,00	Rp3.909.876.210,00	Rp390.987.103,00	9,09%																																								
3	Jasa Lainnya	40	Rp85.289.967.140,80	Rp73.982.770.024,80	Rp11.130.197.116,00	1,33%																																								
4	Pekerjaan Konstruksi	7	Rp58.984.891.503,00	Rp56.312.703.265,27	Rp2.672.188.237,73	4,53%																																								
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>Rp156.979.444.956,80</b>	<b>Rp142.558.991.829,07</b>	<b>Rp14.420.453.127,73</b>	<b>15,55%</b>																																								
Justifikasi dan Rekomendasi	<p>Berdasarkan tabel diatas terdapat 60 paket Pengadaan dengan rincian 44 paket diselesaikan, 15 paket batal (direkomendasikan menggunakan e-purchasing dan 1 paket gagal dengan HPS sebesar Rp156.979.444.956,80. Pada tahun 2023 efisiensi yang dicapai berdasarkan nilai HPS sebesar 15,55%, persentase ini melebihi dari rencana target efisiensi HPS yaitu sebesar 8%.</p>																																													

### 5.3 Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektivitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa						
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa						
Hasil Penilaian	<table border="1" data-bbox="582 940 758 1411"> <tr> <td data-bbox="582 1198 638 1411"></td> <td data-bbox="582 940 638 1198">Jumlah Paket</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1198 694 1411"><b>Target</b></td> <td data-bbox="638 940 694 1198">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1198 758 1411"><b>Realisasi</b></td> <td data-bbox="694 940 758 1198">97,78%</td> </tr> </table>		Jumlah Paket	<b>Target</b>	100%	<b>Realisasi</b>	97,78%
	Jumlah Paket						
<b>Target</b>	100%						
<b>Realisasi</b>	97,78%						
Justifikasi dan Rekomendasi	<p>Berdasarkan tabel diatas, tingkat keberhasilan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokja berhasil dicapai dengan persentase sebesar 97,78%. Persentase realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan terdapat 1 paket pengadaan yang statusnya batal dan dilanjutkan dengan metode <i>e-purchasing</i>.</p>						

#### 5.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang Baik						
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal						
Hasil Penilaian	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Persentase Kepuasan</td> </tr> <tr> <td><b>Target</b></td> <td>93,87 %</td> </tr> <tr> <td><b>Realisasi</b></td> <td>93,87 %</td> </tr> </table>		Persentase Kepuasan	<b>Target</b>	93,87 %	<b>Realisasi</b>	93,87 %
	Persentase Kepuasan						
<b>Target</b>	93,87 %						
<b>Realisasi</b>	93,87 %						
Justifikasi dan Rekomendasi	<p>UKPBJ menyampaikan kuesioner kepuasan layanan UKPBJ dengan menargetkan pelanggan/stakeholder internal (KPA, PPK, Pokja Pemilihan) guna mengukur kepuasan pelayanan UKPBJ dalam proses pengadaan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Kuesioner tersebut berisi 5 pertanyaan dengan rentang nilai kepuasan dari angka 1 hingga 5. Jumlah responden dari survei tersebut adalah sebanyak 19 orang responden. Berdasarkan hasil survey tersebut, sebanyak 93,07% menyatakan puas dengan kinerja pelayanan UKPBJ.</p> <p>UKPBJ Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan kuesioner kepuasan layanan dengan menargetkan penyedia guna mengukur kepuasan pelayanan UKPBJ dalam proses pengadaan. Kuesioner tersebut berisi 5 pertanyaan dengan rentang nilai kepuasan dari angka 1 hingga 5. Jumlah responden adalah sebanyak 13 orang responden. Berdasarkan hasil survey tersebut, 94,67% penyedia puas dengan pelayanan UKPBJ Kementerian Luar Negeri selama penyedia mengikuti proses tender/seleksi/penunjukan langsung tahun 2023.</p>						

## PENUTUP

Indeks Kinerja Utama di tahun 2023 salah satu diantaranya ada yang belum terlaksana sesuai target, sehingga upaya evaluasi dan perbaikan sistem akan terus dilaksanakan. Namun untuk keseluruhannya, sesuai Kriteria Pencapaian sudah mendapat Kategori Baik (>80). Untuk kedepannya dibutuhkan sinergi dari seluruh penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa (sekretariat UKPBJ), pelaku pengadaan (KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dll.), pimpinan, serta stakeholder di Lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun 2023 ini akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024, sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.